

# TESIS

## **PERJANJIAN GADAI TANAH DALAM PEMANFAATAN TANAH PUSAKO DI NAGARI KOTO TANGAH, KABUPATEN AGAM**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Megister Kenotariatan di Fakultas  
Hukum Universitas Andalas



**Diajukan Oleh**  
**Ilham Yudha Putra, SH**  
**NIM : 1520122028**

**Pembimbing :**

**Dr. Kurnia Warman, SH.M.Hum**

**Dr. A. Irzal Rias, SH.MH**

**Magister Kenotariatan**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Andalas**

**2019**

## ABSTRAK

### PERJANJIAN GADAI TANAH DALAM PEMANFAATAN TANAH PUSAKO DI NAGARI KOTO TANGAH, KABUPATEN AGAM

Gadai tanah pusako merupakan suatu transaksi yang mana masyarakat adat di Sumatra Barat khususnya di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tiltang Kamang Kabupaten Agam secara umum melaksanakannya. Dalam kegiatan transaksi gadai tanah pusako ini terdapat beberapa perbedaan dari transaksi gadai yang sudah diatur dalam hukum positif Indonesia. Dari kondisi tersebut diambil rumusan masalah yakni : (1) Bagaimana cara pengikatan gadai atas tanah pusako di Nagari Koto Tengah .(2) Kapan berakhirnya pengikatan gadai atas tanah pusako di Nagari Koto Tengah (3) Bagaimana penyelesaian sengketa dalam gadai tanah pusako di Nagari Koto Tengah dan juga Peranan Notaris/PPAT dalam hal gadai tanah pertanian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua), yakni : data primer berupa wawancara dan observasi di lapangan sedangkan data skunder berupa studi dokumen. Untuk analisis data dilakukan secara kualitatif. Setelah dilaksanakan penelitian, penulis merumuskan kesimpulan masing-masing rumusan masalah, yakni : (1) Cara pengikatan gadai atas tanah pusako di Nagari Koto Tengah dilakukan secara tertulis dan diketahui oleh penghulu dari masing - masing pihak serta sudah ada aturan nagari perihal pendaftaran gadai ini. (2) berakhirnya pengikatan gadai atas tanah pusako di Nagari Koto Tengah terjadi apabila telah ditebus atau di hapuskan oleh yang menerima gadai. (3) penyelesaian sengketa dalam gadai tanah pusako di Nagari Koto Tengah melalui beberapa tingkatan dimulai dari tingkat suku, jorong, nagari hingga pengadilan di tingkat terakhir dan Peranan Notaris/PPAT dalam hal gadai tanah pertanian lebih kepada pencatatan setiap setiap perbuatan hukum yang menjadi akta otentik dan tersimpan dan tercatat oleh pejabat publik yang diberikaan kewenangan oleh negara.

Kata Kunci : Perjanjian Gadai, Tanah Pertanian dan Pusako

## ABSTRACT

### THE AGREEMENT OF LAND PAWN IN UTILIZATION OF TANAH PUSAKO IN NAGARI KOTO TANGAH, DISTRICT AGAM

Pusako land pawn is a transaction where the indigenous people in West Sumatra, and being implemented especially in Nagari Koto Tengah, Tilatang Kamang Subdistrict, Agam Regency. In this pusako land pawn transaction there are several differences from pawning transactions that have been regulated in Indonesian positive law. Formulation of the problem is taken as follows: (1) How to pawn the pusako land in Nagari Koto Tengah (2) When is the end of pawning on pusako land in Nagari Koto Tengah (3) How is the settlement of sangketa in pusako pawn in Nagari Koto and what is the role of the Notary/PPAT in the case of pawning of agricultural land. This research uses an empirical juridical approach. The data used in this study are 2 (two), namely: primary data in the form of interviews and observations in the field while secondary data in the form of document studies. Data analysis is done qualitatively. The conclusions of the problem, namely: (1) The method of pawning the pusako land in the Koto Tengah Nagari Koto Tengah is done in writing and is known by the head of each party and there is already the rule regarding this mortgage registration. (2) the end of the mortgage on the pusako land in the Koto Tengah Nagari occurs when it has been redeemed or abolished by those who receive the mortgage. (3) the settlement of sangketa in pusako land pawns in Nagari Koto Tengah involving several levels starting from the tribal, jorong, nagari level until the last court and the role of Notary / PPAT in the case of agricultural land pawn more to recording every legal act that becomes authentic deed and stored and recorded by public officials given authority by the state.

Keywords: Pawn Agreement, Farmland and Pusako

